



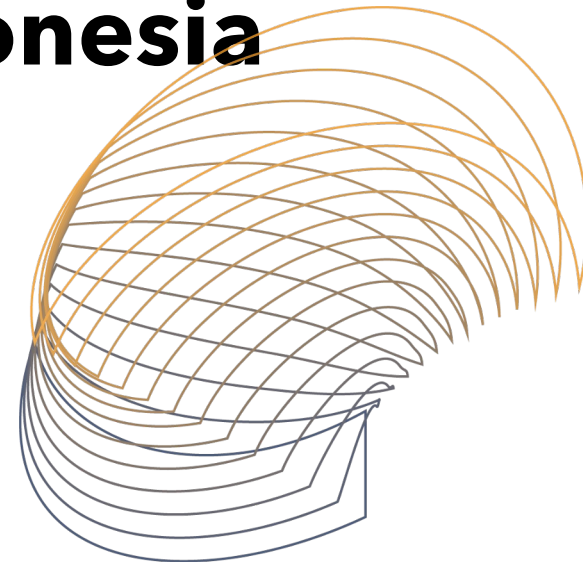
Defending Digital Rights  
in Southeast Asia

**Case Study**

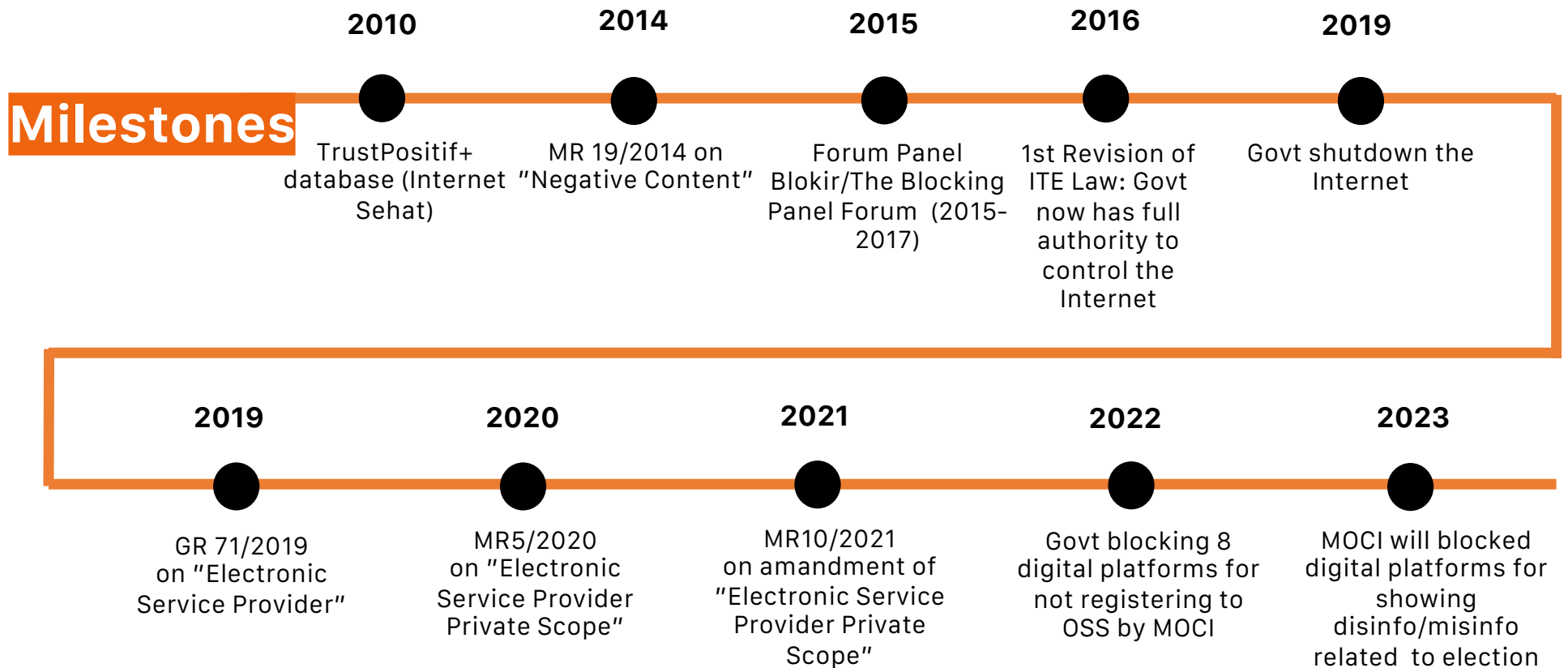
# Practices and Regulation of Content Moderation in Indonesia

**Damar Juniarto, Executive Director SAFE net**

**30 August 2023**



# INDONESIA'S CONTENT MODERATION



# PRACTISES ON CONTENT MODERATION



**Content and Applications**  
APPLICATION LAYER

- Filtering and Blocking Mechanism
- Govt request to digital platforms
- Govt direct order to users via virtual police



**Protocols (TCP/IP, DNS, etc.)**  
TRANSPORT LAYER

- DNS resolver
- DNS Nusantara (proposed)



**Telecommunications Infrastructure**  
PHYSICAL LAYER

- Bandwith throttling
- Internet Shutdowns

# TRACK RECORDS



2014

2018



The screenshot shows the top portion of a news article on the website SOLOPOS.com. The header includes the site's logo, a navigation menu icon, and an information icon. The main headline reads: "VIMEO DIBLOKIR : Menkominfo Blokir Situs Berbagi Video Vimeo Karena Goyang Seronok, Netizen Protes". Below the headline, the date and time are listed as "Senin, 12 Mei 2014 - 11:00 WIB". The author is identified as "Sepudin Zuhri / Jibi / Bisnis / Newswire" and the editor as "Rini Yustiningsih | Solopos.com".

Source: <https://www.solopos.com/vimeo-diblokir-kemenkominfo-belum-terima-penjelasan-resmi-508401>



The screenshot shows the top portion of a news article on the website Kominfo. The headline reads: "Kominfo: Blokir Tik Tok Hanya Sementara". Below the headline, the category is listed as "Kategori Sorotan Media | daon001". The main image is a dark blue banner with the logo of the Indonesian Ministry of Communication and Informatics (KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA) and the tagline "Menuju Masyarakat Informasi Indonesia".

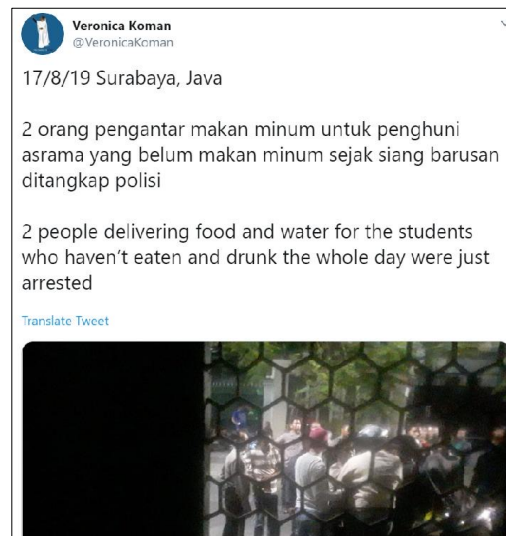
Source: [https://www.kominfo.go.id/content/detail/13332/kominfo-blokir-tik-tok-hanya-sementara/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/13332/kominfo-blokir-tik-tok-hanya-sementara/0/sorotan_media)

# TRACK RECORDS

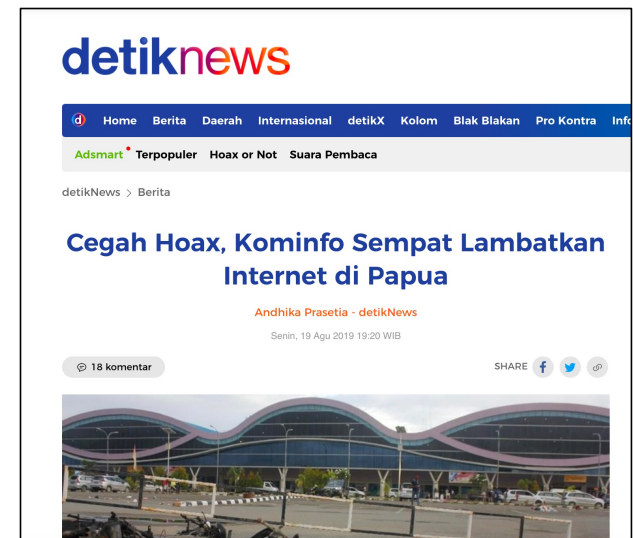
2019



2019



2019

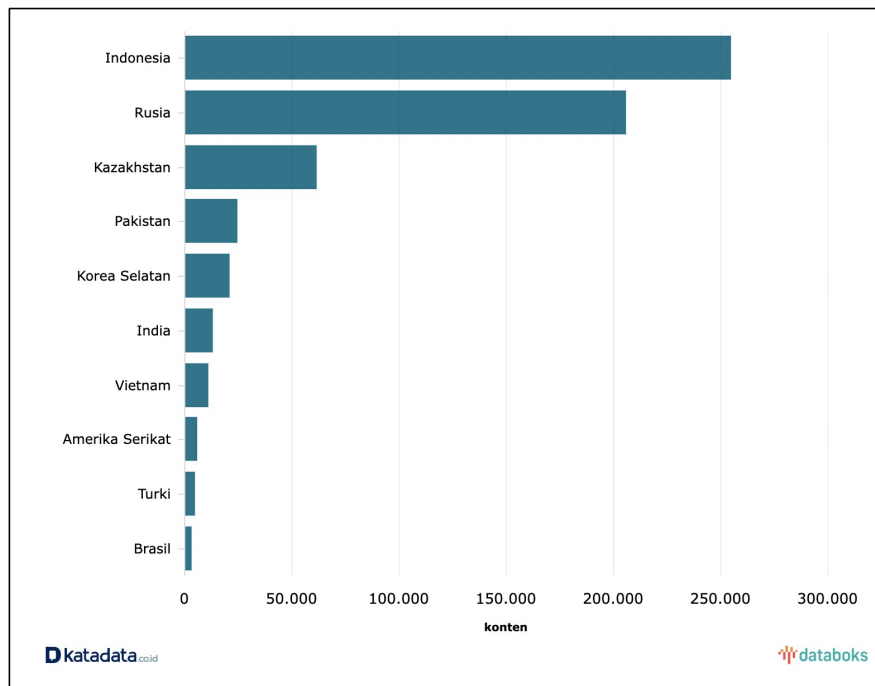


# TRACK RECORDS



2021

In 1<sup>st</sup> semester 2021, Indonesia requests 254,461 content to be removed from Google. And 99.98% of requests came from the MOCIT.



Source: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/26/google-indonesia-paling-banyak-minta-penghapusan-konten>

2022



# INVASIVE CONTENT REGULATION



Ministerial Regulation (MR) 5/2020 and its amendment MR 10/2021 are the most invasive of human (digital) rights.

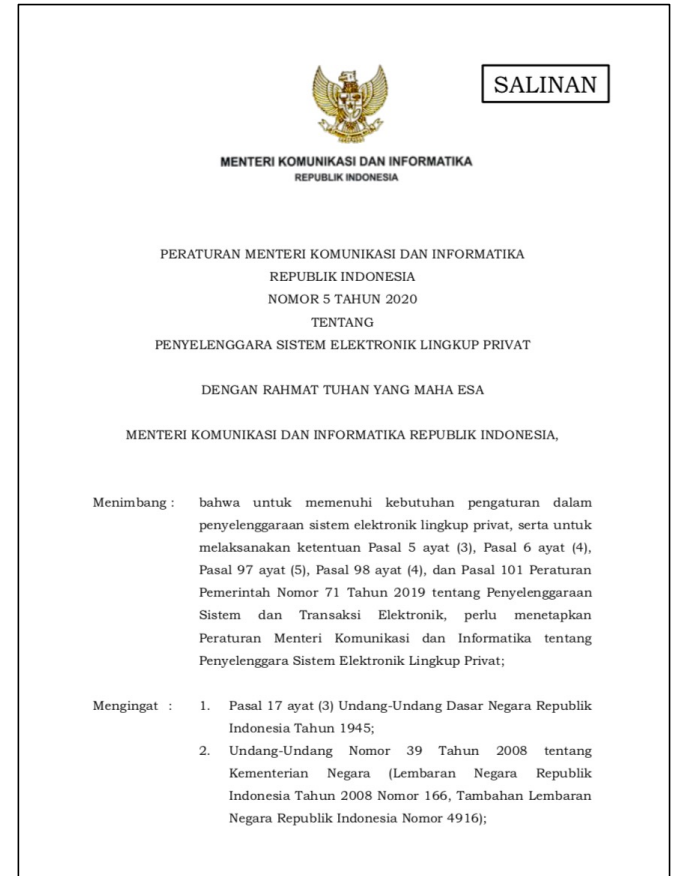
The government can request that content be removed that is considered "disturbing public order".

Minimal comprehensive assessment due to very short content take down time.

Governments can require Digital Platforms to grant access to users' personal data with claims of "oversight"

There is no regulation regarding the indicators of an "urgent" content to be taken down

Threatening the openness of the Internet and open access to information.



## The government can request that content be removed that is considered "disturbing public order".

### Article 9

- (3) PSE Lingkup Privat wajib memastikan:
- Sistem Elektroniknya tidak memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang; dan
  - Sistem Elektroniknya tidak memfasilitasi penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan klasifikasi:
- (4) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat memfasilitasi penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan klasifikasi:
- melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; dan
  - memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.

### Article 13

- (1) PSE Lingkup Privat wajib melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

- (2) Kewajiban melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat memfasilitasi penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) termasuk dalam lingkup kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

Article 9 paragraph 4: Information and electronic documents

prohibited in paragraph 3 can be classified ...

b. disturbing the public and disrupting public order

Article 13: digital platforms have to take down the prohibited information and electronic documents in article 9 paragraph 4



## Minimal comprehensive assessment due to very short content take down time.

### Article 15

- (6) PSE Lingkup Privat yang diperintahkan melakukan Pemutusan Akses (*take down*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah surat perintah Pemutusan Akses diterima.
- (7) Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melaksanakan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri dapat melakukan Pemutusan Akses dan/atau memerintahkan ISP untuk melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektroniknya (*access blocking*) setelah mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh PSE Lingkup Privat.

Article 15 paragraph 6: digital platform(s) that instructed to do take down have to take down illegal information and documents no less than 24 hours.

Paragraph 8: ... for urgent illegal information and documents must be deleted no later than 4 hours

- (8) Permohonan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang bersifat mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), PSE Lingkup Privat wajib melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesegera mungkin tanpa penundaan paling lambat 4 (empat) jam setelah peringatan diterima.
- (9) Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melaksanakan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Menteri dapat melakukan Pemutusan Akses dan/atau memerintahkan ISP untuk melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektroniknya (*access blocking*) setelah mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh PSE Lingkup Privat.

## Governments can require Digital Platforms to grant access to users' personal data with claims of "oversight"

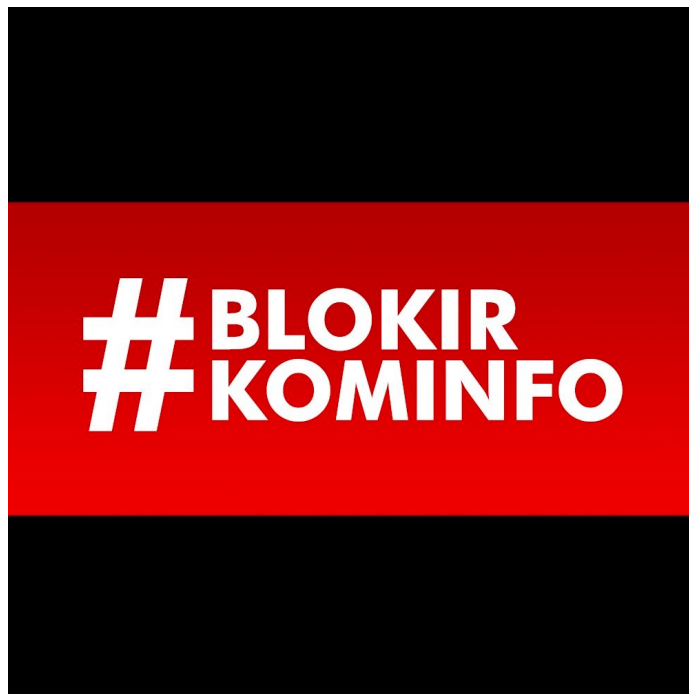
### Article 21

- (1) PSE Lingkup Privat wajib memberikan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik kepada Aparat Penegak Hukum dalam rangka penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  
Article 15 paragraph 6: digital platform(s) that instructed to do take down have to take down illegal information and documents no less than 24 hours.
- (2) PSE Lingkup Privat wajib memberikan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik kepada Aparat Penegak Hukum dalam rangka penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  
Paragraph 8: ... for urgent illegal information and documents must be deleted no later than 4 hours

# PUSHBACK OF MR5: #BLOKIRKOMINFO



## Digital Movement



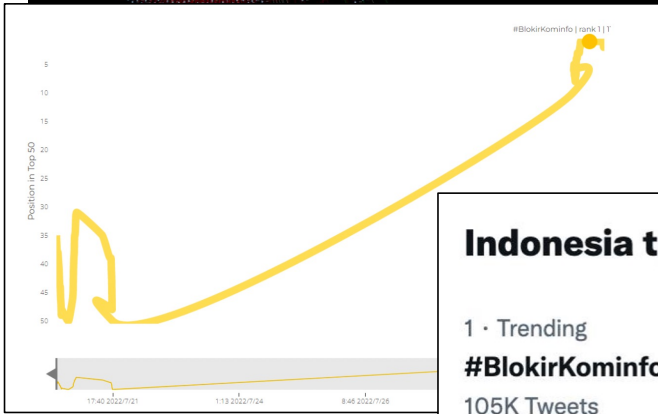
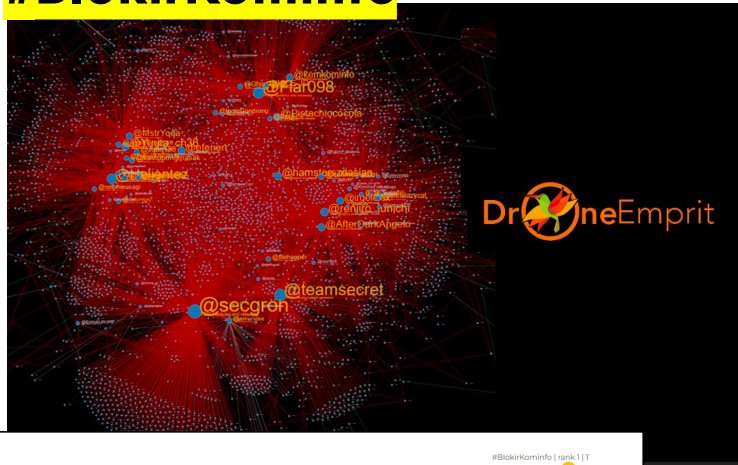
## Litigation



# ADVOCATING #BLOKIRKOMINFO



## #BlokirKominfo



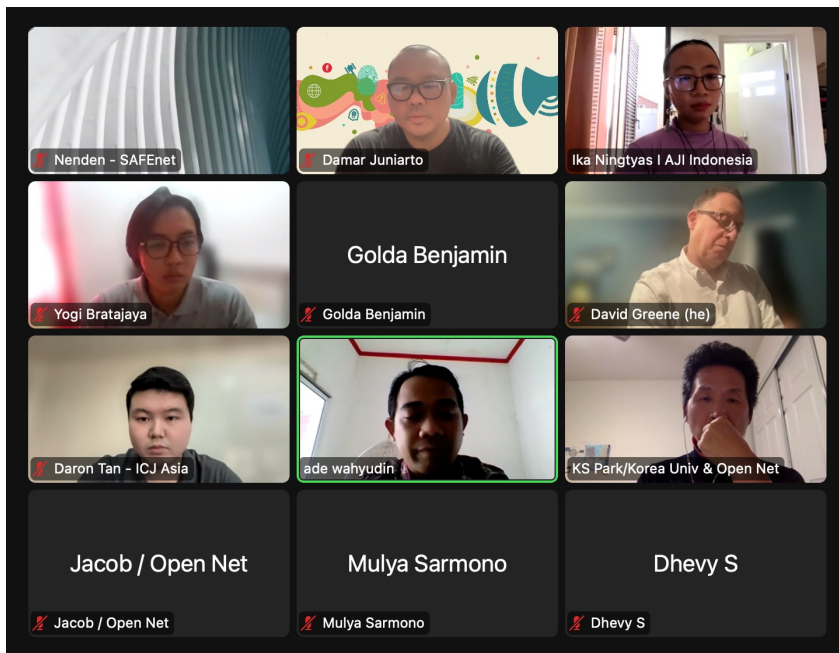
**Indonesia trends**  
1 · Trending  
**#BlokirKominfo**  
105K Tweets



# MORE ACTIONS



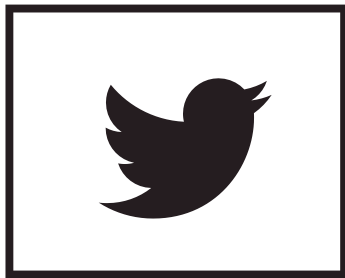
## International Advocacy



## National Coalition



# THANK YOU



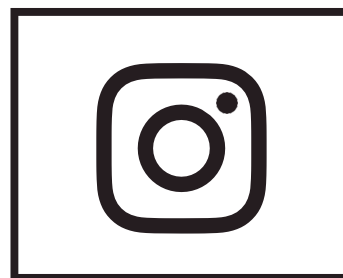
TWITTER

@safenetvoice



FACEBOOK

safenetvoice



INSTAGRAM

safenetvoice



HOTLINE

08119223375

[info@safenet.or.id](mailto:info@safenet.or.id)